

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN *KHITBAH*  
OLEH PIHAK PEREMPUAN  
(Studi Kasus di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI  
Provinsi Sumatera Selatan)**

**Skripsi**

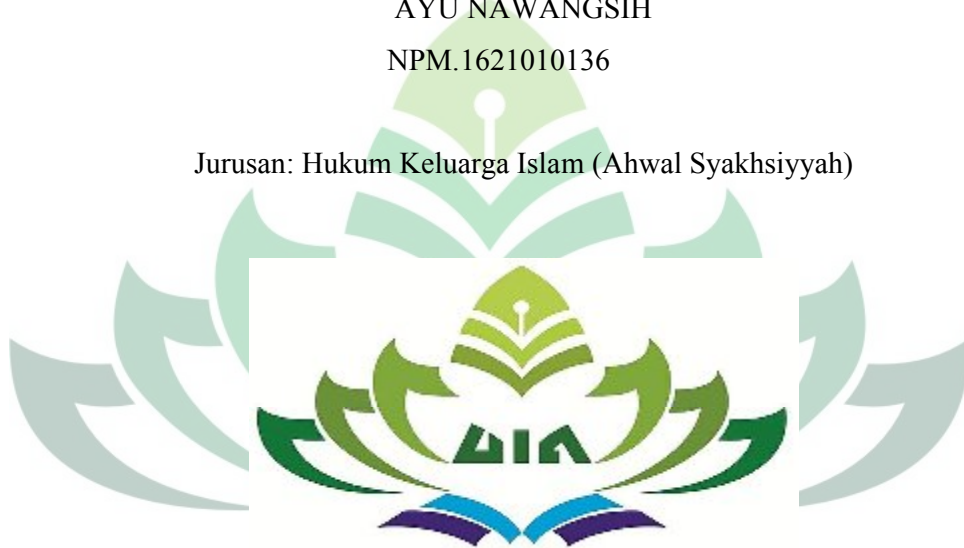
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

AYU NAWANGSIH

NPM.1621010136

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
GANTI RUGI AKIBAT PEMBATALAN *KHITBAH*  
OLEH PIHAK PEREMPUAN  
(Studi Kasus di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI  
Provinsi Sumatera Selatan)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

AYU NAWANGSIH

NPM. 1621010136

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020 M**



## ABSTRAK

*Khitbah* adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dengan perempuan, dengan tujuan agar saling mengenal dan mempererat keduanya untuk kejenjang pernikahan. Dalam *khitbah* terdapat banyak hal yang harus dihadapi oleh kedua belah pihak adanya ketidakcocokan menyebabkan terjadi pembatalan *khitbah* sehingga mengakibatkan ganti rugi. Peneliti tertarik untuk mengetahui praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan di desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI. Rumusan Masalah dari penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan di desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI? 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan di desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI, dan untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik *interview*, dan dokumentasi. Responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang terdiri dari 3 orang pihak perempuan yang membatalkan *khitbah*, 1 tokoh agama dan 1 tokoh adat. Metode pengolahan data yang dilakukan adalah pemeriksaan, penandaan dan rekonstruksi data dengan dianalisis menggunakan metode berfikir *deduktif* dan *induktif*. Hasil temuan peneliti yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik ganti rugi dua kali lipat di desa Sumber Deras dalam memutuskan suatu hubungan *khitbah* antara kedua belah pihak telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 13, karena *khitbah* belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas untuk memutuskan hubungan *khitbah*. Dalam kebebasan memutuskan hubungan *khitbah* dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan serta saling menghargai. hukum Islam tidak mengatur mengenai ganti rugi pembatalan *khitbah*. Akan tetapi dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235 menjelaskan mengenai tata cara meng*khitbah* seorang perempuan. Sedangkan menurut analisis hukum Positif, praktik ganti rugi pembatalan *khitbah* ini telah sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yaitu ganti rugi yang mengakibatkan kerugian secara materiil dan immateriil. Kerugian materiil akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan adalah pihak laki-laki merasa dirugikan dalam biaya proses *khitbah*, uang dan barang-barang *khitbah* yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Sedangkan kerugian immateriil yaitu pihak laki-laki merasa dirugikan secara moral, penyesalan, kekecewaan, dan meninggalkan waktu pekerjaan dalam proses *khitbah*.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayu Nawangsih  
NPM : 1621010136  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 09 Maret 2020  
Penulis,

AYU NAWANGSIH  
1621010136





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

**Judul Skripsi** : **"Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan Khitbah Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan)".**

**Nama Mahasiswa** : **Ayu Nawangsih**

**NPM** : **1621010136**

**Jurusan** : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)**

**Fakultas** : **Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197111061998032005**

**Pembimbing II**

**Yufi Wivos Rini M., S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 197304142000032002**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

**H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan Judul : “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan)”. Disusun oleh: Ayu Nawangsih, NPM: 1621010136, Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah, pada Hari/Tanggal : Rabu, 29 Juli 2020**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

**Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H.**

**Penguji I : Marwin, S.H., M.H.**

**Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**Penguji III : Yufi Wiyos Rini M., S.Ag., M.Si.**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H.**  
**NIP. 196210221993031002**



## MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ

كَفِيلًا ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpahmu itu). Sesungguhnya, Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.<sup>1</sup>

(Q.S. An-Nahl [16]: 91)



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahih*, (Q.S. An-Nahl [16]: 91), Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku Bapak Purwanto, Ibu Ertina Triastuti dan Alm. Ibu Indarti, nenek Sumarmi serta Kakek Muhroni, yang aku hormati dan aku banggakan. Selalu menguatkanmu sepuh jiwa raga, merawatmu, memperhatikanku, memotivasiku dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, dan mendo'akanku agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Swt keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Saudara/I ku kakak Nurul Hidayati, adek Sulistio, Wahyu Nawang Wulan dan Wisnu Yoga Setiawan, yang selalu memberikan motivasi untuk selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan studiku dan pula bibi dan paman yang selalu memberikan dukungan dan do'anya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta tempatku menimba ilmu-ilmu yang *Rabbani*, UIN Raden Intan Lampung. Semoga menjadi universitas yang selalu maju dan dapat mencetak anak bangsa yang berkualitas.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama penulis Ayu Nawangsih lahir pada 21 Maret 1998, di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. anak kedua dari 5 bersaudara.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah SDN 01 Mesuji Sumber Deras pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs. Sholaatul Fatikh yang diselesaikan pada tahun 2013. Selanjutnya melanjutkan kejenjang pendidikan di SMK Negeri 1 Mesuji yang diselesaikan pada tahun 2016. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, pada Fakultas Syari'ah dan mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis selama diperkuliahan di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, mengikuti pendidikan informal kursus berbahasa Inggris di DUINA selama 1 tahun.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam marilah kita junjung agungkan kepada baginda Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umatnya yang kita nanti-nantikan syafa’atnya *diyaumul qiamah*. *Amin Amin Yaa Robbal ‘aalamin*.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi berkualitas dan menjunjung tinggi nilai Islami.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.



3. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I, selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh., S.Ag., M.Si., pembimbing I dan II yang penuh kesabaran, keteladanan dan berkenan meluangkan waktu memberikan pemikiran dan nasehat untuk membimbing serta mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat seperjuangan khususnya kelas C yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghadapi proses perkuliahan UTS dan UAS hingga prose skripsi. Kalian luar biasa Niken Purnama Sari, Marisa Putri, Putri Sanggita Padmayani, Betha Saputri dan Sulistia Reza yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang kita raih bersama-sama bermanfaat dan mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat serta rekan-rekan angkatan 2016 Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang Ahwal al-Syakhsiyyah.

Bandar Lampung, Juni 2020  
Penulis,

Ayu Nawangsih

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Fokus Penelitian .....	7
E. Rumusan Masalah .....	8
F. Tujuan Penelitian .....	8
G. Signifikasi Penelitian .....	8
H. Metode Penelitian.....	9
 <b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. KONSTRUKSI HUKUM <i>KHITBAH</i> .....	15
1. Pengertian, dan Dasar Hukum <i>Khitbah</i> .....	15
2. Syarat-syarat <i>Khitbah</i> dan Halangannya.....	19
3. Tujuan dan Hikmah <i>Khitbah</i> .....	23
4. Akibat Hukum <i>Khitbah</i> .....	25
B. PEMBATALAN <i>KHITBAH</i> DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM.....	27
1. Hukum Pembatalan <i>Khitbah</i> .....	27
2. Ganti Rugi Akibat Pembatalan <i>Khitbah</i> .....	28
C. PEMBATALAN <i>KHITBAH</i> DALAM HUKUM POSITIF.....	30
1. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 .....	30
2. Kompilasi Hukum Islam .....	30
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).....	31
4. Perjanjian (Akad).....	35
D. KONSEP <i>MASLAHAH MURSALAH</i> .....	36
E. PANDANGAN ULAMA MENGENAI STATUS BARANG PEMBERIAN <i>KHITBAH</i> .....	40
1. Pendapat Imam Hanafi.....	41

2. Pendapat Imam Maliki .....	44
3. Pendapat Imam Syafi'ie .....	46
4. Pendapat Imam Hambali .....	49
F. TINJAUAN PUSTAKA .....	50
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Objek .....	52
1. Sejarah Singkat Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI .....	52
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) .....	53
3. Visi, Misi, dan Tujuan .....	55
4. Keadaan Geografis Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI .....	57
5. Keadaan Demografi Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI .....	58
B. Deskripsi Data Penelitian .....	61
1. Pelaksanaan Khitbah ( <i>Lamaran</i> ) di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI .....	61
2. Bentuk Kerugian Akibat Pembatalan Khitbah .....	66
3. Praktik Tradisi Ganti Rugi Akibat Pembatalan <i>Khitbah</i> di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI .....	67
4. Faktor-faktor Akibat Pembatalan <i>khitbah</i> oleh pihak perempuan .....	75
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan <i>Khitbah</i> oleh Pihak Perempuan di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI .....	76
B. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Ganti Rugi Akibat Pembatalan <i>Khitbah</i> Oleh Pihak Perempuan di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI .....	79
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Rekomendasi .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran Surat Izin Penelitian	
Lampiran Surat Keterangan Wawancara	
Lampiran Pedoman Wawancara	
Lampiran Dokumen Pendukung (Foto)	
Lampiran Cover ACC Cetak	
Lampiran Blangko Konsultasi Skripsi	
Lampiran Surat Keterangan Lulus Turnitin	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji  
Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) ..... 54



## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Jumlah Penduduk Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI berdasarkan Kelompok Usia .....	58
2. Mata pencaharian Penduduk.....	59
3. Pendidikan .....	60
4. Sarana Pendidikan Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI.....	61
5. Sarana Peribadahan .....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Wawancara dengan Yeni Noviarita sebagai pihak yang membatalkan *khitbah*
2. Wawancara dengan Nur Diana sebagai pihak yang membatalkan *khitbah*
3. Wawancara dengan Windi Lestari sebagai pihak yang Membatalkan *khitbah*
4. Wawancara dengan Bapak Supiyo sebagai Tokoh Adat
5. Wawancara dengan Bapak Muhroni sebagai Tokoh Agama



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Judul merupakan kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah **Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah* Oleh Pihak Perempuan (Studi Kasus Di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan)**. Beberapa istilah yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau aktivitas penguraian suatu pokok, pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya dan penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam berkaitan dengan hukum keluarga adalah seperangkat peraturan-peraturan atau ketentuan berdasarkan Al-Qur'an, hadits, dan hukum syara' dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.<sup>2</sup>
3. Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum ditinjau menurut waktu berlakunya berdasarkan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 58

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin dalam buku Aulia Muthiah "*hukum Islam Dinamika seputar hukum keluarga*", (Yogyakarta: Pustak Baru Press, 2017), h. 15

sebagai sumber hukum. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat dalam daerah tertentu. Hukum Positif dalam perkawinan adalah suatu peraturan-peraturan yang berisi pasal-pasal mengatur mengenai janji kawin.<sup>3</sup>

4. *Khitbah* (Peminangan) adalah langkah pendahuluan menuju kearah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>4</sup>
5. Ganti Rugi adalah penggantian kerugian yang dialami seseorang. Penggantian biaya, dan rugi karena tak terpenuhinya suatu perikatan.<sup>5</sup>
6. Pembatalan *Khitbah* adalah perbuatan membatalkan peminangan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah analisis terhadap ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* (peminangan) oleh pihak perempuan perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan memilih dan menetapkan judul di atas sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Judul seperti ini belum ada yang bahas khususnya di jurusan Hukum Keluarga Islam.

---

<sup>3</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2001), h. 21.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 79

<sup>5</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 136



- b. Mengetahui analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang ditempuh sebagai Mahasiswa di jurusan Hukum Keluarga Islam dimana *khitbah* adalah bagian dari kajian perkuliahan.
- b. Referensi judul ini mudah diperoleh dan cukup memadai di jurusan Hukum Keluarga Islam.
- c. Lokasi penelitian mudah dijangkau dan informasi mudah diperoleh.

## C. Latar Belakang Masalah

Menurut perspektif Fikih, perkawinan sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut pada proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Perkawinan dalam Islam tidaklah hanya semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal

---

<sup>6</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Aka Press, 1992), h. 114.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar Rum [30]: ayat 21;

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar Rum [30]: 21).<sup>8</sup>

Perkawinan adalah perintah agama kepada mereka yang telah mampu melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah akan tetapi kebutuhan secara materil belum mampu, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka.

Tujuan perkawinan tercantum dalam Al-Qur'an dan Undang-undang perkawinan, apabila tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik maka proses awal dilaksanakan selaras dengan ketentuan-ketentuan agama dan hukum yaitu proses yang akan dilalui adalah *khitbah* atau peminangan”.<sup>9</sup>

*Khitbah* adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk saling

<sup>7</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2005), h. 5.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahi*, (Q.S Ar Rum[30]: 21), Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.

<sup>9</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2004), h. 82

mengenal (karakter, sifat, perilaku) dan mempererat hubungan antara kedua belah pihak kejenjang pernikahan.<sup>10</sup>

*Khitbah* dilakukan secara langsung oleh seseorang yang berkehendak mencari jodoh atau perantara yang dipercaya. *Khitbah* dapat dilakukan dengan sindiran (*kinayah*) atau terang-terangan (*sarih*).<sup>11</sup> *Khitbah* atau peminangan sebagai langkah awal perkawinan ini di maksudkan agar masing-masing pihak saling mengenal pribadi dan identitas masing-masing sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan syara'.

Berkaitan dengan *khitbah* pada umumnya terdapat tradisi atau kebiasaan yang terjadi dalam proses pelaksanaannya yaitu pihak laki-laki memberikan barang-barang *khitbah*, seperti perhiasan/emas, uang, hasil pertanian dan perlengkapan lainnya kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa seseorang tersebut telah bersedia untuk melanjutkan kejenjang pernikahan yang disebut *paningset*. Pemberian *khitbah* harus dibedakan dengan mahar, karena pemberian *khitbah* ini termasuk ke dalam pengertian *hibah* (hadiah). Akibat hukum yang ditimbulkan pemberian ini berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar.

Proses melangsungkan *khitbah* terdapat perbedaan baik karakter maupun sikap, sehingga perlu adanya pertimbangan dan penilaian diantara kedua belah

---

<sup>10</sup> Saifuddin Sa'dan dan Arif Afandi, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167, h. 130-147.

<sup>11</sup> *Ibid*, Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 63

pihak.<sup>12</sup> Ketidakcocokan salah satu pihak, menurut syara' pembatalan *khitbah* diperbolehkan dengan cara yang ma'ruf karena hal tersebut merupakan rencana untuk menikah. Apabila tidak terjadinya pembatalan *khitbah* yang dilakukan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, maka akan terjadi perceraian setelah pernikahan.

Pembatalan *khitbah* merupakan hal yang biasa dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Namun mayoritas masyarakat beranggapan bahwa pembatalan *khitbah* terjadi karena adanya penilaian salah satu pihak yang memiliki banyak kekurangan sehingga menimbulkan sikap ragu-ragu, akibatnya maka terjadi kegagalan *khitbah*.

Apabila mengawali proses *khitbah* maka pembatalan harus diakhiri dengan cara yang ma'ruf dan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Hal yang diperbolehkan dalam pembatalan *khitbah*, seperti salah satu atau kedua belah pihak menemukan kekurangan fisik, menyimpang dari tuntunan Islam, memiliki akhlak tidak terpuji, memiliki kelainan seksual serta alasan-alasan lain yang menghalangi keberlangsungan dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas yang melatarbelakangi ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan terdapat tradisi unik di Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan peneliti menemukan persoalan yaitu ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan. Dalam pembatalan tersebut status barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan akan berbeda pula akibatnya yaitu jika

---

<sup>12</sup> Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, (Jakarta: Belanoor, 2011), h. 72.

pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki akan meminta seluruh barang yang telah diberikan kepada pihak perempuan secara utuh disertai dengan ganti rugi biasanya minimal sejumlah barang-barang maupun uang tunai yang telah diberikan dari pihak laki-laki yaitu dua kali lipat.<sup>13</sup>

Adanya ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* dapat menjadi bahan pertimbangan bagi yang ingin membatalkan *khitbah* yaitu untuk mengantisipasi dan menahan laju konflik yang timbul akibat keputusan *khitbah*. Praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah*, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan mengingat bahwa Undang-undang Perkawinan tidak ada pembahasan terkait dengan masalah ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* tersebut. Akan tetapi, di dalam Kompilasi Hukum Islam membahas mengenai hukum pembatalan serta tata cara memutus hubungan *khitbah*.

Pembatalan *khitbah* tidak berakibat hukum tetapi menimbulkan akibat moral. Moral yang dimaksud adalah moral yang tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang ada di masyarakat.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah membahas tentang ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan menurut hukum Islam dan hukum Positif.

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 65.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah kemukakan dalam latarbelakang masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimana praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan di desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan?

### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas terdapat beberapa tujuan penelitian ini, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan di desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji Kabupaten OKI.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap praktik ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan.

### G. Signifikansi Penelitian

Setiap penelitian tentunya akan diperoleh hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian maupun pihak lain yang membutuhkan, terutama dalam hal pengembangan keilmuan dan praktik. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan acuan analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan sebagai acuan bagi para peneliti yang tertarik dengan tradisi ganti rugi akibat pembatalan *khitbah* oleh pihak perempuan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terdiri dari dua bagian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka. Maka dalam penelitian ini jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*field Research*).<sup>14</sup>

#### b. Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memuat informasi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Pencandraan terhadap fakta tersebut akan menjadi pijakan untuk mengambil kesimpulan umum sehingga dapat dijadikan sebagai dasar prediksi untuk memikirkan tindakan praktis pada saat ini atau pun pada masa yang akan datang.

### 2. Data Dan Sumber Data

#### a. Data

Data adalah bukti yang ditemukan dari hasil penelitian dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

---

<sup>14</sup> Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, (Jakarta: Sumbangsih, 2010), h. 2

## **b. Sumber Data**

### **1) Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara (*interview*), dokumentasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Objek dari penelitian ini adalah pihak-pihak perempuan yang membatalkan *khitbah*, tokoh agama dan tokoh adat di Desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI.

### **2) Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku dan lainnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, adalah sebagai berikut:

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh dari Al-Qur'an, hadits, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Perdata, hukum Islam, kitab fiqh dan pendapat para ulama mengenai status barang pemberian (*hibah*) yang berkaitan dengan skripsi ini.



b) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari referensi buku, kitab-kitab Fiqh munakahat yang terkait dengan *khitbah*.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedi, skripsi, jurnal ilmiah yang mendukung informasi dan menunjang penulisan skripsi.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Pengertian populasi menurut Suharsimi Arikunto adalah “keseluruhan subjek penelitian”<sup>15</sup> atau dengan kata lain keseluruhan jumlah individu yang merupakan sasaran penelitian. Populasi yang menjadi objek/subjek penelitian ini adalah berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 orang pihak perempuan yang membatalkan *khitbah*, 1 tokoh agama dan 1 tokoh adat sebagai responden di desa Sumber Deras, Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI.

#### b. Sampel

Sampel adalah “bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian”. Menurut Suharsimi Arikunto, sampel adalah “sebagian

---

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian atau Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 173

atau wakil populasi yang diteliti”.<sup>16</sup> Dalam penentuan beberapa jumlah sampel yang akan diteliti, merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, maka diambil semua, sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan jika subjeknya melebihi dari 100 orang dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, yaitu berjumlah 5 orang, maka semua populasi dijadikan sampel.

Penelitian ini adalah penelitian populasi. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 orang pihak perempuan yang membatalkan *khitbah*, 1 tokoh Agama dan 1 tokoh Adat sebagai responden.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *interview*, metode observasi dan metode dokumentasi;

##### a. Metode *Interview*

Menurut S. Margono, “Metode *interview* merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga”.<sup>17</sup> Metode *interview* digunakan untuk memperoleh data dari lapangan yaitu tanya-jawab secara lisan terhadap seseorang yang terkait dengan pembahasan skripsi

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 180

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 165.

ini. Narasumber yang dijadikan responden yaitu pihak perempuan yang membatalkan *khitbah*, tokoh agama dan tokoh adat.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya.

**5. Metode pengolahan Data**

Metode yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu dengan cara pemerikasaa data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematika data;

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah mengoreksi data yang terkumpul sudah lengkap dan sesuai dengan permasalahan.

b. Penandaan Data

Penandaan data adalah memberi tanda atau catatan jenis sumber data, seperti buku literatur atau dokumen, nama penulis hak cipta, tahun penerbit, serta urutan rumusan masalah. Tanda atau catatan di letakan dibagian bawah teks tulisan dengan nomor urut (*footnote*).

c. Rekonstruksi Data

Rekonstruksi data adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.

d. Sistematikasi Data

Sistematikasi data adalah menempatkan data berdasarkan urutan masalah pada kerangka bahasan secara sistematika.

## 6. Metode Analisis Data

Proses kegiatan memanfaatkan dan memperoleh data untuk mencari kebenaran atau ketidakbenaran dari hipotesa disebut analisis data. Secara kualitatif, bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya. Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini, antara lain;

### a. Metode Berfikir *Deduktif*

Metode deduktif adalah “Suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu kita hendak menilai sesuatu kejadian yang khusus”. Metode deduktif ini digunakan untuk mengumpulkan data-data perpustakaan secara umum, seperti buku-buku fikih, hadits, pendapat tentang status barang pemberian, hukum Islam dan Hukum Positif yang diambil secara khusus sehingga ditemukan kebenaran atau kepastian.

### b. Metode Berfikir *Induktif*

Metode induktif adalah “Suatu penelitian dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut menjadi bersifat umum”. Metode *induktif* digunakan untuk menggali data-data berupa teori atau pendapat yang bersifat khusus yang berkaitan dengan ganti rugi pembatalan *khitbah* menurut hukum Islam dan hukum Positif.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. KONSTRUKSI HUKUM *KHITBAH*

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum *Khitbah*

*Khitbah* merupakan kata yang tersusun dari huruf خ, ط dan ب memiliki dua makna adalah *khataba*, *yukhatibu*, *khitaban*, merupakan akar dari *khutba*. *Khitbah* adalah meminta untuk menikahi atau mengajak untuk menikah.<sup>1</sup> Dalam hukum Islam, peminangan, pertunangan dikenal dengan kata *khitbah*, secara terminologi arab berasal dari kata yang sama yaitu *al-khitab* dan *al-khathab* (pembicara).

Menurut pendapat Abdul Rahmman Ghozali, peminangan secara bahasa yaitu meminang atau melamar dalam artian meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain. Sedangkan secara istilah ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita atau seorang laki-laki yang meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang lebih umum di masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan ilmu fiqh, lamaran, peminangan disebut dengan *khitbah* yaitu permintaan dari seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikahinya, baik dilakukan secara langsung atau perantara yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Juz 2, (Kairo: Ittihad al-Kitab al-Arab, 2002), h. 198

<sup>2</sup> *Ibid*, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, .... h. 73-74

<sup>3</sup> *Ibid*, Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, .... h. 24

*Khitbah* adalah suatu pernyataan keinginan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya, baik pemberitahuan keinginan tersebut secara langsung maupun melalui perantara keluarganya.<sup>4</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *khitbah* adalah langkah pendahuluan menuju ke arah perijodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan menggunakan kebiasaan yang berlaku masyarakat setempat. *Khitbah* merupakan pendahuluan sebelum akad perkawinan. Sebelum dilakukan akad nikah maka masing-masing pihak terlebih dahulu harus saling mengenal sehingga pelaksanaannya berdasarkan pandangan dan pilihan yang jelas.<sup>5</sup>

Berdasarkan hukum perkawinan Islam, *khitbah* adalah tahap awal untuk menuju ke jenjang ikatan perkawinan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut peminangan.<sup>6</sup> *Khitbah* merupakan pendahuluan perkawinan sebelum terjadinya akad nikah dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami kedua belah pihak. Sebelum melakukan perkawinan pihak laki-laki harus menentukan pilihan yang sesuai dengan kriterianya yaitu perempuan akan dinikahi karena empat hal, sebagaimana disebutkan di dalam hadits:

---

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-ila' Istri, Li'an, Masa Iddah)*, jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 36-37.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, .... h. 505

<sup>6</sup> *Ibid*, Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan*, .... h. 25

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاظْفَرْ بِذَاتِ  
الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “wanita itu dinikahi karena empat hal: harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, maka engkau akan bahagia.” (Muttafaq ‘alaih dan As-Sab’ah yang lainnya).<sup>7</sup>

Berdasarkan dari hadits di atas, Nabi Saw memerintahkan kepada laki-laki. Apabila ia mempunyai keinginan untuk menikah kemudian menemukan seorang perempuan yang taat beragama, maka janganlah berpaling, karena ada larangan untuk menikah dengan perempuan bukan karena agamanya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits Abdullah bin Amr secara ma’ruf: ”Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan karena kecantikannya, sebab hal tersebut dapat menjerumuskan mereka dalam kebinasaan dengan bersikap sombong dan takabur; dan jangan pula menikahi mereka karena hartanya, hal itu bisa menjerumuskan dalam perbuatan maksiat dan dosa. Dan nikahilah mereka karena agamanya. Ketahuilah, sesungguhnya perempuan yang beragama walaupun telinga sobek lebih utama daripada perempuan cantik tetapi tidak beragama”.

Sumber hukum *khitbah* dalam Al-Qur’an dan hadits, banyak membahas tentang *khitbah*. tetapi tidak secara jelas mengenai ganti rugi. Adapun dasar hukum *khitbah* tercantum dalam firman Allah SWT. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] ayat 235:

<sup>7</sup> Muhammad Ismail Al-Amir Ash-Shanani, *Subullus Sallam Syarah Bulughul Maram*, jilid 2, (Bandung: Darus Sunnah), h. 608



وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

حَلِيمٌ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan menikahi mereka) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 235).<sup>8</sup>

Menurut Ibnu Hajar, ayat ini menjelaskan bahwa membolehkan seseorang mengkhitbah secara sindiran ialah perempuan masih dalam masa 'iddah karena ditinggal mati suaminya (*talak ba'in*). Mengkhitbah perempuan dengan sindiran atau terang-terangan yang masih dalam masa iddah *talak raj'i* hal tersebut diharamkan.<sup>9</sup>

Apabila seorang laki-laki telah mampu untuk menikah, memilih perempuan karena kebajikannya, rela dengan sifat-sifatnya, sehingga dapat mencapai keinginannya, kemudian menyampaikan niat untuk mengkhitbah. Hadits ini sebagai berikut:

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahi*, (Q.S. Al-Baqarah [2]: 235), Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.,

<sup>9</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 72.



عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ.

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda: “*Apabila salah seorang diantara kalian ingin meminang perempuan, jika ia bisa melihat apa-apa yang dapat mendorongnya untuk menikahnya, maka lakukanlah.*”<sup>10</sup>

## 2. Syarat-syarat *Khitbah* dan Halangannya

Pasal 12 KHI menjelaskan prinsip *khitbah* dapat dilakukan terhadap seorang gadis atau janda yang telah habis masa ‘iddahnya. Dalam pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) menjelaskan tentang perempuan yang dipinang tidak terdapat halangannya adalah sebagai berikut :<sup>11</sup>

- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan pihak wanita yang dipinang.

Beberapa persyaratan dalam *khitbah* yang harus dilakukan seorang laki-laki kepada seorang wanita, antara lain:

### a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat berupa anjuran dan tidak wajib dipenuhi oleh seorang laki-laki yang akan meng*khitbah* seorang

<sup>10</sup> Hadits Shahih, Diriwayatkan oleh Ahmad (III/334,360), Abu Daud (no. 2082) dan al-Hakim (III/165), dari Sahabat Jabir bin ‘Abdillah Radhiyallahu ‘anhuma.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992), h. 17

perempuan, sehingga harus meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan *dikhitbahnya*.

Adapun syarat-syarat *mustahsinah* adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Perempuan yang *dikhitbah* setara dengan laki-laki yang *mengkhithbahnya*. Seperti setara kedudukannya, pengetahuan dan lain sebagainya.
- 2) Perempuan yang *dikhitbah* hendaklah mempunyai sifat kasih sayang dan bisa memberikan keturunan.
- 3) Sebelum *mengkhithbah* terlebih dahulu mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti dari perempuan yang *dikhitbah* dan sebaliknya.

#### b. Syarat *Lazimah*

Syarat *Lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum *khithbah* dilakukan, sahnya *khithbah* tergantung dengan adanya syarat-syarat *lazimah*.

Adapun syarat-syarat *lazimah*, adalah sebagai berikut:

- (1) perempuan yang tidak dalam *khithbah* laki-laki lain.

Apabila seorang perempuan yang telah *dikhitbah* oleh laki-laki lain tidak boleh *dikhitbah* lagi, maka hukumnya haram sehingga menyakiti hati *pengkhithbah* pertama. Karena merampas hak,

---

<sup>12</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 35

memecahkan hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman dalam kerukunan masyarakat.<sup>13</sup>

Larangan meng*khitbah* perempuan yang telah di*khitbah* oleh orang lain tercantum dalam pasal 12 ayat (3) KHI, yang berbunyi:

“Dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang laki-laki lain, selama peminangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan.<sup>14</sup>

Meminang peminangan orang lain dilarang apabila perempuan itu telah menerima peminangan pertama beserta walinya dengan jelas mengizinkannya. Begitu sebaliknya, tidak dilarang jika peminangan pertama ditolak oleh pihak perempuan atau karena peminang pertama telah memberi izin kepada peminang yang kedua. Al-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Al-Syafi’ie berkata: *”bilamana perempuan yang dipinang merasa ridha dan senang, maka tidak ada seorang pun yang boleh meminangnya lagi. Akan tetapi jika belum diketahui ridha dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya”*.<sup>15</sup>

## (2) Perempuan yang di*khitbah* tidak dalam masa *iddah raj’i*.

Yaitu talak yang masih memungkinkan ruju’ tanpa akad baru. Haram hukumnya dipinang baik secara terang-terangan maupun sindiran (*kinayah*), karena perempuan tersebut masih mempunyai

<sup>13</sup> Alkaf Idrus, *Persiapan Perkawinan Yang Harmonis Dan Bahagia*, (Pekalongan: Gunung Mas, 1996), h. 65.

<sup>14</sup> Soesilo dan Pramuji R, *kitab Undang-undang....*, h. 507

<sup>15</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 45.

ikatan perkawinan dengan suaminya sehingga sewaktu-waktu dapat merujuk kembali.<sup>16</sup>

Para fuqaha telah bersepakat keharaman meng*khitbah* perempuan dalam masa iddah talak *raj'i* yaitu suami boleh ruju' kepada istri sebab talak tersebut belum mencapai ketiga kalinya dan sang istri masih menjadi hak suami. Suami diperbolehkan ruju' kembali kapanpun dan tidak melakukan akad serta mahar yang baru selama masih dalam masa 'iddah.<sup>17</sup>

(3) Melihat Perempuan yang akan *dikhitbah*

Adapun dengan melihat perempuan yang *dikhitbah* dapat diketahui dari paras, sifat dan akhlaknya dapat diketahui melalui informasi dari orang yang dekat dengannya, seperti keluarga dan saudaranya.<sup>18</sup>

(4) Perempuan yang *dikhitbah* bukan perempuan yang diharamkan, seperti ibu, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibi dari ayah, dan bibi dari ibu.

(5) Perempuan yang *dikhitbah* bukan istri orang.

(6) Perempuan dalam masa iddah karena kematian suaminya, hanya boleh *dikhitbah* dengan sindiran (*kinayah*).

(7) Perempuan dalam masa *iddah bain sughra*

<sup>16</sup> *Ibid*, Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, .... h. 79

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 31

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 510

Seorang perempuan yang tertalak *bain sughra* yaitu telah bercerai satu dan dua kali. Apabila seorang perempuan (istri) yang telah bercerai dua kali maka seorang suami ingin ruju' kembali harus dengan akad nikah dan mahar yang baru .

- (8) Perempuan dalam masa *iddah bain kubra* boleh dikhitbah oleh bekas suaminya, setelah menikah dengan laki-laki lain, di *dukhul* dan diceraikan.

Uraian di atas dapat dipahami, bahwa perempuan yang statusnya kebalikan dari yang dijelaskan tersebut maka terhalang untuk dikhitbah.

### 3. Tujuan dan Hikmah *Khitbah*

#### a. Tujuan *Khitbah*

*Khitbah* sebagaimana pendahuluan perkawinan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak untuk saling mengenal antara keduanya. Karena *khitbah* tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, karakter dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi, hal ini harus dilakukan yang diperbolehkan secara syari'at. Apabila kedua belah pihak telah menemukan rasa kecocokan dan keselarasan, maka diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Tujuan-tujuan dari kedua belah pihak yaitu akan merasa tentram, bahagia, serasi, tenang dan penuh rasa cinta serta rasa sayang.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, .... h. 21



*Khitbah* adalah tindakan yang cukup positif, karena ada maksud baik dari pihak laki-laki untuk melangsungkan perkenalannya kejenjang selanjutnya. Adapun proses yang dapat dilakukan dengan secara yang baik (*ma'ruf*), sehingga dapat melanjutkan dan membinanya serta dapat memahami antara kepribadian keduanya maka akan lebih cepat mengaplikasikan ke proses saling asih, asah, dan asuh. Adapun tujuan *khitbah*, adalah sebagai berikut:

1. Menjamin perkawinan yang kehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat;
2. Membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah mempunyai ikatan peminangan;
3. Memberikan kesempatan untuk saling mengenal antara satu sama lain.

b. Hikmah *Khitbah*

Pada setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Hikmah disyariatkannya *khitbah* yaitu untuk lebih menguatkan hati kedua calon kedua belah pihak dan menguatkan ikatan sebelum melakukan akad perkawinan.<sup>20</sup> Oleh karena itu, untuk menguatkan atau memantapkan hati keduanya maka kedua belah pihak dibolehkan untuk melihat atau memandang terlebih dahulu. Dalam hal ini,

---

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 50

dibolehkan agar tidak adanya penyesalan yang akan terjadi setelah akad tersebut dilaksanakan.

#### 4. Akibat Hukum *Khitbah*

*Khitbah* merupakan janji akan menikah dan belum menimbulkan akibat hukum serta tidak bersifat mengikat sehingga salah satu pihak boleh memutuskan. Menurut pendapat Wahbah Zuhaili bahwa akhlaq Islam menuntut untuk bertanggungjawab setiap tindakan. Terutama yang sifatnya berkaitan dengan perkawinan.<sup>21</sup>

Berdasarkan dalam akad perjanjian, jika pihak laki-laki maupun perempuan tidak menepati janji, maka salah satu pihak termasuk melakukan perbuatan ingkar. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim;

عن ابوهريارةرضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu,

*Rasulullah Saw bersabda: tanda orang munafik itu ada tiga 1) jika berbicara berdusta; 2) jika berjanji maka tidak menerpati; 3) jika diberi amanah dia berkhianat.” (HR. Bukhori dan Muslim).*<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Bairut: Darul Al-Fikr, 1989), h.25

<sup>22</sup> Ahmad Ali, *Buku Besar Al-Bukhari & Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), h. 26.

Seorang Muslim berkewajiban menunaikan janji yang telah dibuatnya. Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-Isra' [17]: 34, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا  
بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَرَامَةٌ ۖ

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”*. (Q.S. Al-Isra' [17]: 34).<sup>23</sup>

Makna kalimat dari ayat di atas, adalah Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban bagi mereka melanggar/mengingkari janji yang telah dibuatnya.<sup>24</sup> Apabila ingin memutus atau membatalkan *khitbah* harus dilandasi oleh alasan yang rasional dan kuat. Berkaitan dengan *khitbah* ini dalam terdapat kebiasaan pada waktu pelaksanaannya, yaitu pihak laki-laki memberikan suatu pemberian, seperti perhiasan, uang, makanan serta hasil bumi sebagai tanda bahwa seseorang tersebut berniat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan.

Pemberian pada saat *khitbah* berbeda dengan *mahar*. *Mahar* adalah pemberian pada saat terjadinya akad nikah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahih*, (Q.S. Al-Isra' [17]: 34), (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema).

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 2323.

bertentangan dengan hukum Islam.<sup>25</sup> Pemberian dalam hukum Islam disebut dengan *hadiah (Hibah)*, akibat yang ditimbulkan pemberian hadiah tersebut berbeda dengan pemberian dalam bentuk *Mahar*.

## **B. PEMBATALAN *KHITBAH* DALAM KONSTRUKSI HUKUM ISLAM**

### **1. Hukum Pembatalan *Khitbah***

*Khitbah* merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah. Sesudah itu diikuti dengan memberikan pembayaran maskawin seluruh atau sebagiannya dan memberikan macam-macam hadiah serta pemberian-pemberian guna memperkokoh pertalian hubungan antara kedua belah pihak.

*Khitbah* adalah sekedar janji nikah, bukan akad yang bersifat mengikat sehingga dapat dibatalkan. Membatalkan *khitbah* merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam mengadakan perjanjian. Syariat tidak menjatuhkan hukuman secara materi untuk pembatalan janji itu.<sup>26</sup>

Pihak laki-laki atau perempuan terkadang membatalkan rencana perkawinannya dan hal ini menjadi hak kedua belah pihak yang telah mengikat perjanjian *khitbah*. Bagi orang yang menyalahi janjinya, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil. Akan tetapi perbuatan ini dipandang tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat-sifat munafik, kecuali adanya alasan-alasan yang benar menjadi sebab tidak dipatuhinya

<sup>25</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*..., h. 20

<sup>26</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah-Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa Oleh Abdul Majid, Umar Mutjahidin dan Arif Mahmudi, (Jakarta Timur: Ummul Qura, Belajar Islam dari sumbernya, 2014), h. 446

perjanjian pada awalnya.<sup>27</sup> Apabila dalam mengawali *khitbah*, maka ketika mengakhiri/ membatalkan *khitbah* pun harus dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* dan tidak menyalahi ketentuan syara'.

Pada saat membatalkan *khitbah* perlu diperhatikan adanya alasan-alasan syar'i. Seperti salah satu pihak menemukan kekurangan memiliki kelainan seksual, akhlak tidak terpuji, dan lain sebagainya yang dinilai dapat menghambat keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan dapat menimbulkan kemudharatan.

## 2. Ganti Rugi Akibat Pembatalan *Khitbah*

Kebiasaan pada masyarakat setempat, apabila terjadi pembatalan *khitbah* dari pihak laki-laki, maka barang pemberian pada saat *khitbah* (*seserahan*) yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak boleh diminta kembali dan sebaliknya, jika yang membatalkan *khitbah* adalah pihak perempuan, maka barang *seserahan* tersebut harus dikembalikan kepada pihak laki-laki yang meng*khitbah*nya.

Barang yang telah diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan berhak diminta kembali jika tidak terjadinya akad nikah karena barang pemberian sebagai ganti rugi dan imbalan perkawinan. Sebelum terlaksananya akad perkawinan, pihak perempuan yang telah di*khitbah* belum mempunyai hak sedikit pun terhadap barang pemberian tersebut dan wajib ia mengembalikan kepada pemiliknya. Adapun pemberian barang dan hadiah-hadiah yang telah diberikannya maka hukumnya sama dengan

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, Cet.1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 511-512.



*hibah*. Secara hukum Islam, *hibah* tidak boleh diminta kembali karena merupakan suatu simbol sukarela dan tidak bersifat sebagai pengganti dari sesuatu.<sup>28</sup>

Apabila barang yang *dihibahkan* telah diterima, maka barang tersebut sudah menjadi miliknya dan ia boleh menggunakannya sesuai dengan keinginannya. Jika pemberi *hibah* memintanya kembali berarti merampas milik orang yang diberi *hibah* tanpa keridhaannya. Dalam demikian, perbuatan seperti ini menurut hukum maupun akal adalah batal. Akan tetapi, jika itu diberikan sebagai imbalan dari penerima *hibah*, kemudian tidak dipenuhi maka *hibahnya* boleh diminta kembali. Maksud dari tidak dipenuhi yaitu apabila perkawinannya tidak terlaksana atau ternyata dibatalkan maka peminang berhak meminta kembali atas barang-barang yang telah *dihibahkannya*.

Adapun mengenai ganti rugi dari kerugian-kerugian secara materi ataupun secara moral yang terjadi akibat pembatalan *khitbah*, seperti pengeluaran kelengkapan peralatan, pakaian, meninggalkan pekerjaan, menyia-nyiakan peng*khitbahan* lainnya, atau mencoreng reputasinya dengan membatalkan *khitbah* yang telah lama terjalin misalnya selama empat tahun. Para ahli fiqh terdahulu belum memberikan status hukumnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*,

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 38.

### C. PEMBATALAN *KHITBAH* DALAM HUKUM POSITIF

#### 1. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur *khitbah* secara rinci. Dalam hukum Islam, *khitbah* tidak dapat disebut dengan peristiwa hukum karena tidak menimbulkan hak dan kewajiban akan tetapi peristiwa *khitbah* itu tetap menimbulkan implikasi moral. Atas dasar ini, walaupun *khitbah* tidak memiliki implikasi hukum tetap akan tetapi diberikan aturan-aturan moral.<sup>30</sup>

Para pengkaji hukum Islam menyebut bahwa syarat perkawinan yang tercatum dalam pasal 8 dan 7 sebenarnya secara implisit mengatur peminangan tersebut. Salah satu syarat perkawinan adalah adanya persetujuan kedua calon mempelai. Menurut Yahya Harahap pasal ini mengisyaratkan untuk terjadinya persetujuan bersama dan mengharuskan adanya peminangan atau lamaran untuk bisa saling mengenal.<sup>31</sup>

#### 2. Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Kompilasi hukum Islam, terdapat dalam pasal 11, 12, dan 13, menjelaskan tentang *khitbah*. Dalam pasal 11 KHI menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkendak mencari pasangan jodoh. Akan tetapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dipercaya. Pasal 12 KHI menjelaskan tentang perempuan yang boleh dipinang, yaitu gadis atau janda yang telah habis masa iddahnya, perempuan yang ditalak suami masih dalam masa iddah

<sup>30</sup> *Ibid*, Amir Nuruddin dan Azhari, *Hukum Perdata Islam*, .... h. 90

<sup>31</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan nasional*, (Medan: Zahir Trading co, 1975), h.

*raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang, serta meminang seorang perempuan yang sedang dipinang laki-laki lain selama peminangan laki-laki tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan. Putusnya peminangan dari pihak laki-laki, adanya pernyataan putusnya hubungan pertunangan atau secara diam-diam pihak laki-laki yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang. Dalam Pasal 13 KHI, menjelaskan pada prinsipnya apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum berakibat hukum. Dalam hal ini pasal 13 KHI ayat (1), dan ayat (2), menegaskan bahwa:<sup>32</sup>

- (1) “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”.
- (2) “Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”.

Penjelasan dalam KHI tersebut semakin tegas bahwa meskipun *khitbah* tidak berakibat hukum tetapi peminangan itu membawa akibat moral. Moral yang dimaksud adalah moral yang tidak hanya berdasarkan agama tetapi juga menyangkut norma-norma susila dan tradisi (adat) yang ada di masyarakat.<sup>33</sup>

### 3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)

Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dan hubungan antara subyek hukum.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*..., h. 18

<sup>33</sup> *Ibid*, Amir Nuruddin dan Azhari, *Hukum Perdata Islam*..., h. 93

Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum. Seperti: politik, pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintah sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antar penduduk atau warga negara. Seperti: kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Dalam Pasal 1, hukum perdata merupakan hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu dengan yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.

Berdasarkan Hukum perdata terdapat beberapa unsur, adalah sebagai berikut:

1) Peraturan hukum

Peraturan hukum adalah rangkaian ketentuan mengenai ketertiban.

Meliputi peraturan secara tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum perdata secara tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan.<sup>34</sup> Sedangkan sumber hukum tertulis, yaitu:

---

<sup>34</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 119

- (a) *Algemene Bepalingen van wetgeving*, yaitu ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia-Belanda yang berlaku di Indonesia terdiri atas 36 pasal.
- (b) KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*) merupakan ketentuan hukum produk Hindia-Belanda yang diundangkan tahun 1848 dan diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.
- (c) KUHD (*Wetboek Van Koopandhel*), terdiri atas 754 pasal yang meliputi buku I tentang dagang secara umum dan buku II tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran.
- (d) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Undang-undang ini mencabutu berlakunya buku II KUH Perdata mengenai hak atas tanah, kecuali hipotek. Secara umum dalam Undang-undang ini diatur mengenai hukum pertanahan yang berlandaskan pada hukum adat, yakni hukum yang menjadi karakter bangsa Indonesia itu sendiri.
- (e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan. Undang-undang ini membuat ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Buku I KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan tidak berlaku secara penuh.

## 2) Hubungan hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum yaitu hak dan kewajiban pribadi yang satu terhadap pribadi lainnya dalam hidup bermasyarakat.



### 3) Orang (person)

Orang/person adalah subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi dan badan hukum, baik negara Indonesia maupun warga negara asing.<sup>35</sup>

Kerugian akibat perbuatan melawan hukum dipertegas dalam pasal 1365

KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.<sup>36</sup>

Kerugian yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah kerugian akibat perbuatan melawan hukum tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian immateriil. Adanya ganti rugi atas kerugian dalam bentuk setara atau pengembalian pada keadaan semula.

Unsur adanya kerugian yaitu akibat perbuatan pelaku yang dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, kerugian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu materiil dan immateriil.<sup>37</sup>

- a. Kerugian materiil, adalah sesuatu yang bisa dihitung dan dinominalkan seperti uang, barang, biaya, kehilangan keuntungan, kehilangan sesuatu yang akan dinilai dalam bentuk uang dan lain sebagainya.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap KUHP, KUH Acara Perdata, KUH Acara Pidana*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2016), h. 242.

<sup>37</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 73

- b. Kerugian immateriil, adalah sesuatu yang bersifat abstrak dan tidak bisa langsung dihitung nominalnya, seperti penyesalan, kekecewaan, ketakutan, rasa sakit, waktu, dan lain sebagainya.

Bunyi pasal 1365 KUH Perdata di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut:

- (1) Adanya perbuatan;
- (2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- (3) Adanya kesalahan;
- (4) Adanya kerugian.
- (5) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

#### 4. Perjanjian (Akad)

##### a. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, sedangkan dalam hukum Islam disebut “akad”. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).<sup>38</sup> Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu’ahadah Ittifa’*, Akad atau kontrak dapat diartikan sebagai Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kobul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan

---

<sup>38</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68

yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertam. Akad tidak terjadi apabila pernyataan pihak tidak terkait kehendak satu sama lain, karena akad keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

#### **b. Macam-macam Akad**

- 1) *Daman Al-aqd*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
- 2) *Daman Al- 'Udwan*, yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan merugikan/melawan hukum.

### **D. KONSEP MASLAHAH MURSALAH**

#### **1. Pengertian Maslahah Mursalah**

Secara etimologis *Al-maslahah Al-Mursalah* merupakan gabungan dari dua suku kata yang terdiri dari *maslahah* dan *mursalah*. Secara etimologi, kata *maslahah* diambil dari (صَلَح) atau (صَلَح-صَلَحًا-مُصْلِحَةً) yang berarti “kebaikan” atau “sesuatu yang bermanfaat dan sesuai”. Kata ini merupakan lawan kata dari *fasadun* yang berarti “rusak” atau “sesuatu yang mendatangkan kerusakan”.<sup>39</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *maslahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kemaslahatan

---

<sup>39</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan), h. 440

berarti kegunaan, kebaikan, dan kemanfaatan. Arti secara umum, *masalah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan dan ketenangan, sedangkan dalam arti menolak atau menghindari, yaitu menolak kemudharatan atau kerusakan. Sehingga setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan *masalah*.<sup>40</sup>

Adapun secara terminologis, para ulama mempunyai berbagai definisi *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Menurut pandangan Asy-Syatibi, seperti yang dikutip oleh Muhammad Usman, bahwa *Al-Maslahah Al-Mursalah* merupakan setiap prinsip syara' yang tidak disertai bukti nash khusus, namun sesuai dengan kehendak syara'.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas, titik tolak *Al-maslahah Al-Marsalah* adalah tujuan syara' (*maqashid syari'ah*) atau berdasarkan pada ketetapan syara' kemaslahatan yang sifatnya tidak ditentukan oleh nash (Al-Qur'an maupun sunnah), untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kemudharatan, serta mendatangkan kemaslahatan masyarakat umum. Akan tetapi, *masalah* ini harus ditempatkan pada kerangka kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syara' adalah pemeliharaan lima hal pokok (*kulliyat al-Khams*), yakni dalam rangka menjamin terpeliharanya jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 634

<sup>41</sup> Muhammad Usman, *Buku Deras Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam*, (Sukoharjo: Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta, 2009), h. 102

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh. Terj. Saefullah Ma'sum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 427

Menurut Imam Malik, *Al-maslahah Al-Marsalah* adalah suatu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kemudharatan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer), maupun *hajiyyah* (sekunder).<sup>43</sup>

Adapun beberapa macam penjelasan di atas mengenai *al-maslahah*, tidak semua *al-maslahah* mengandung unsur manfaat. Dalam hal ini, ketika hal tersebut tidak dijelaskan di dalam syara' (*maqasid al-syari'ah*) serta tidak termasuk *al-maslahah*, segala kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash* atau *qiyas* yang *sahih* karena semua pertentangan terhadap keduanya terdapat penguat untuk membatalkannya.

## 2. Macam-macam *Al-Maslahah*

Adapun macam-macam *masalahah* berdasarkan tingkatannya menjadi tiga tingkatan yaitu :<sup>44</sup>

### a) *Maslahah Dharuriyah* (Primer)

*Maslahah dharuriyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat berdirinya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan manusia, merajalela kerusakan, timbul fitnah, serta kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, dalam hal ini perkara pokok yang harus dipelihara yaitu agama, akal, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka kebutuhan primer manusia akan terpenuhi.

<sup>43</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pusat Setia, 2010), h. 119

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 121



b) *Maslahah Hajjiyah* (Sekunder)

*Maslahah Hajjiyah* adalah semua bentuk perbuatan dan perilaku yang tidak terkait dengan dasar yang lain seperti agama, akal, jiwa, keturunan dan harta (*maslahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. *Maslahah Hajjiyah* ini tidak merusak dan terancam, akan tetapi dapat menimbulkan kepicikan dan kesempitan dan *hajjiyah* ini berlaku dalam bidang ibadah, adat, muamalat, dan bidang jinayat (*uqubat*).

c) *Maslahah Tahsiniyah* (Tersier)

*Maslahah tahsiniyah* adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan serta kesempitan. Dalam hal ini, tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ibadah, adat, mu'amalat, dan bidang jinayat (*uqubat*). dalam bidang ibadah seperti kewajiban bersuci dari najis, sholat, puasa, menutup aurat, sedekah, dan lain sebagainya.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian ketiga kebutuhan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari semua hukum syari'at Islam adalah untuk menjaga serta memelihara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier

---

<sup>45</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 299.

(pelengkap atau menyempurnakan pemeliharaan kepada salah satu dari ketiga kepentingan tersebut.

### 3. Syarat-syarat Berhujjah Dengan Al-Maslahah Mursalah

Adapun syarat-syarat *maslahah mursalah*, adalah sebagai berikut:

- a) *Maslahah* secara keseluruhan harus sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syari'at (*maqasid syari'ah*). dalam artian tidak menghilangkan satu dasar pun dari dasar-dasar agama dan dalil-dalil *qothi*. Dengan syarat harus sesuai dengan maslaht-maslahat yang menjadi tujuan dari syari'at, meskipun tidak ditemukan dalil-dalil khusus yang menerangkannya.<sup>46</sup>
- b) *Maslahah* tersebut harus meyakinkan dan tidak meragukan, dalam artian harus ada pembahasan dan penelitian yang rasiononal serta mendalam sehingga dapat memberikan manfaat (kemaslahatan) dan menolak kemudharatan.
- c) *Maslahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit.
- d) *Maslahah* itu bukan masalah yang tidak benar, dimana *nash* yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggap salah.

### E. PANDANGAN ULAMA MENGENAI STATUS BARANG PEMBERIAN *KHITBAH*

Membatalkan *khitbah* hukumnya boleh, jika hal itu dipandang lebih maslahat. Karena *khitbah* bukanlah akad dalam perkawinan, dan tidak

---

<sup>46</sup> *Ibid*,

mengapa jika seseorang membatalkan lamarannya. Hanya saja membatalkan lamaran bisa menjadi makruh jika tidak didasari alasan yang benar. Hal ini dikarenakan pembatalan *khitbah* merupakan sebuah pengingkaran terhadap janji untuk melakukan perkawinan.

### 1. Pendapat Imam Hanafi

Imam Hanafi menjelaskan kedudukan pemberian *khitbah* dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, jika pemberian masih dalam keadaan utuh sebagaimana diberikan pertama kali, seperti gelang, cincing, kalung, dan lainnya, maka pihak laki-laki berhak memintanya kembali. Jika pemberian itu mengalami kerusakan, maka pihak laki-laki tidak berhak menuntut ganti atas kerusakan tersebut dengan nilai yang setara.<sup>47</sup>

Pemberian yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan yang dilamarnya mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan *hibah*, maka hukum yang berlaku adalah hukum *hibah*. Hukum *hibah* menyatakan bahwa jika *hibah* itu mengalami kerusakan, maka ia tidak boleh mengambil kembali atau tidak boleh meminta ganti rugi dengan nilai yang setara.

Menurut Hasiyah Ibnu ‘Abidin, untuk menetapkan bahwa berhak tidaknya seorang laki-laki dalam meminta kembali barang bawaan yaitu disyaratkan harus adanya kerelaan dari kedua belak pihak atau melalui jalur pengadilan. Dalam hal ini, disyaratkan juga tidak boleh ada halangan yang menjadikannya tidak boleh diminta kembali. Contohnya seperti

---

<sup>47</sup> Muhammad Ra’fat ‘Utsman, *fikih Khitbah dan Nikah*, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h. 46

pihak laki-laki memberikan kain kepada pihak perempuan, kemudian kain tersebut sudah ditenun atau dijahit menjadi baju, maka *pengkhitbah* tidak berhak meminta untuk dikembalikan.

Menurut Imam Hanafi bahwa barang pemberian yang dibawa oleh *pengkhitbah* kepada pihak yang *dikhitbah* kedudukan hukumnya sama seperti yang telah mereka sepakati dalam masalah hibah. Mereka memandang bahwa hibah boleh diminta kembali kecuali apabila ada halangan yang menjadikan hibah tersebut tidak bisa diminta kembali. Contohnya seperti apabila seseorang membawa barang bawaan kepada pihak yang *dikhitbah* berupa sebuah jam, lalu jam tersebut hilang atau membawa makanan dan makanannya sudah habis dimakan, maka yang demikian itu tidak bisa diminta kembali karena hukumnya sama dengan hibah.

*khitbah* adalah pendahuluan ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan bukan sebuah akad nikah sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Jika pihak perempuan atau keluarganya menerima lamaran dari pihak laki-laki, maka itu sama seperti halnya telah menjanjikan untuk menikahinya. Begitu juga dengan pihak laki-laki seakan ia telah sepakat berjanji untuk menikah.

Permasalahan ini tidak ditemukan di dalam literatur-literatur ulama klasik disebabkan memang tidak pernah terjadi masalah pembatalan *khitbah* dan nikah atau hanya sedikit kasusnya dibandingkan dengan yang terjadi pada saat ini. Jika kasus seperti ini hanya terjadi beberapa kali saja

di masa terdahulu, maka hal demikian tidak akan menuntut diri seseorang untuk selalu meminta ganti rugi terhadap setiap hal yang merugikan dirinya.

Permasalahan ini tidak ditemukannya di dalam kitab-kitab fikih ulama terdahulu dan belum adanya kesepakatan dalam mengatur permasalahan tersebut. Pendapat ini mewajibkan ganti rugi bagi pihak yang membatalkan *khitbah*, karena *khitbah* merupakan akad yang terjalin oleh kedua belah pihak untuk menunaikan akad nikah pada waktu yang telah ditentukan. Namun terkadang pihak pelamar tidak dapat menunaikan akad nikah yang telah disepakati dan telah ditentukan, maka pembatalan pihak pelamar terhadap perkawinan mengharuskannya untuk memberikan ganti rugi atas hal tersebut.<sup>48</sup>

Hukum ganti rugi tidak bermaksud mempengaruhi pada tataran kebebasan seseorang untuk menikah secara mutlak. Karena masing-masing dari kedua belah pihak bisa untuk membatalkan janji untuk menikah. Namun jika pembatalan janji menikah telah meninggalkan kesan yang buruk dan menyakiti pihak yang dibatalkan atau jika pembatalan *khitbah* itu tidak dilandasi oleh alasan yang dibenarkan hanya karena keinginan nafsu semata, maka dengan demikian itu mengharuskannya untuk ditetapkan hukum ganti rugi sebagai bentuk penghormatan bagi pihak yang dibatalkan *khitbah*nya.

---

<sup>48</sup> Ra'fat 'Utsman, *fikih Khitbah dan Nikah....*, h. 56



Beberapa pendapat menjelaskan bahwa ganti rugi yang harus diberikan berlandaskan pada alasan penghinaan dalam penggunaan hak, meskipun kedua belah pihak berhak untuk membatalkan *khitbah*nya dengan alasan kemaslahatan, karena *khitbah* hanya sebatas janji untuk menikah. Akan tetapi hak ini tidak boleh digunakan sebagai pembenaran pada tujuan yang tidak dibenarkan oleh syariat, karena dalam hal ini akan menimbulkan mudharat pada pihak lain.

Hak seseorang tidak pernah dibenarkan oleh syari'at jika hanya untuk kepuasan diri tetapi mengabaikan hak orang lain. Namun hak seseorang telah ditetapkan oleh syari'at guna untuk menciptakan tujuan-tujuan aturan hidup, maka perlindungan tujuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak itu.

## 2. Pendapat Imam Maliki

Imam Maliki berselisih pendapat mengenai permintaan kembalinya barang bawaan *khitbah* yang diberikan kepada pihak yang dikhitbah. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pengkhitbah tidak punya hak untuk meminta kembali barang yang sudah diberikan kepada pihak yang dikhitbah, baik pembatalan *khitbah* itu berasal dari pihak perempuan ataupun dari pihak laki-laki dan sama juga kedudukannya apakah barang itu masih utuh pada saat diberikan ataupun sudah rusak.<sup>49</sup>

Jika yang membatalkan *khitbah* berasal dari pihak perempuan, maka pengkhitbah berhak meminta kembali pemberian yang telah diberikan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 47

kepada pihak yang *dikhitbah*. Dalam hal ini dikarenakan pihak laki-laki memberikan barang untuk menikahi perempuan tersebut sementara perkawinan itu tidak tercapai, maka secara tidak langsung pihak perempuan tidak berhak untuk mendapatkan pemberian tersebut. Kecuali jika kedua belah pihak telah mensyaratkan bahwa barang tersebut tidak boleh diminta kembali apabila perkawinan mereka tidak terjadi. Barang tersebut tidak bisa diminta kembali apabila itu sudah menjadi tradisi yang sudah berkembang di masyarakat dapat mewakili syarat itu sendiri.

Apabila yang membatalkan *khitbah* itu adalah pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta kembali barang pemberiannya yang sudah diberikan kepada pihak perempuan, meskipun pemberian tersebut masih utuh seperti halnya pada saat pertama kali diberikan kepada pihak perempuan yang *dikhitbahnya*.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa Imam Maliki bersepakat jika *khitbah* dibatalkan oleh pihak laki-laki, maka ia tidak mempunyai hak untuk meminta kembali barang pemberiannya. Akan tetapi, jika yang membatalkan *khitbah* itu pihak perempuan, sebagian dari mereka berpendapat bahwa laki-laki itu tidak mempunyai hak untuk meminta kembali barang tersebut. Pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad Ad-Dardiry dan pengikut Imam Maliki bahwa pelamar berhak untuk meminta kembali barang pemberiannya yang telah diberikan kepada pihak perempuan.

Pendapat ini tidak mewajibkan ganti rugi, sebab pembatalan *khitbah* adalah sesuatu yang dibolehkan oleh kedua belah pihak dan selama perkara itu boleh maka ia tidak boleh dihukumi oleh ganti rugi. Karena dengan adanya ganti rugi sama dengan memberikan sanksi (*'uqubah*) kepada pihak yang harus membayarnya dan sesuatu yang mubah tidak boleh dijatuhi sanksi.

Pembatalan *khitbah* tidak bisa dianalogikan dengan thalaq yang jatuh sebelum adanya hubungan badan. Dalam syari'at menetapkan kepada suami yang menikahi istrinya kemudian menthalaknya sebelum adanya hubungan badan dan ia berhak mendapatkan seperuh dari maharnya. Jika pembatalan *khitbah* dianalogikan dengan thalaq dalam hal ini sebuah penganalogian yang salah, karena pernikahan itu berbeda dengan *khitbah* bahkan sangat jauh bedanya dan tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap hukum nikah.

### **3. Pendapat Imam Syafi'ie**

Fikih Imam Syafi'ie menjelaskan bahwa suatu barang yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan setelah *khitbahannya* diterima dan sebelum terjalinnya akad nikah hendaklah dilihat terlebih dahulu. Apakah barang bawaannya itu dimaksudkan sebagai hadiah untuk menikahinya atau hanya sebatas hadiah semata. Jika hadiahnya itu diniatkan untuk menikahi perempuan yang *dikhitbahnya*, maka ia hendak

meminta kembali hadiah tersebut, baik pembatalan *khitbah*nya itu bersumber dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan.<sup>50</sup>

Kelompok ini berhujah bahwa hadiah tersebut tidak pernah diucapkan secara jelas oleh pihak laki-laki sebagai bentuk hadiah semata, namun ada maksud lain yaitu hendak menikahnya dan ia tidak akan tenang terhadap hadiahnya itu jika pernikahannya tidak terjadi.

Imam Ar-Rafi'i, salah seorang tokoh besar terkemuka dari kalangan Imam Syafi'ie, berkata: *"setiap orang yang memberikan sesuatu karena alasan atau tujuan tertentu, kemudian tujuannya itu tidak tercapai dari orang yang diberinya, maka pemberiannya itu hukumnya tidak halal. Oleh karena itu, jika seseorang melamar seorang perempuan dengan memberikan sebuah hadiah tanpa disebutkan bahwa hadiahnya itu bukan hadiah semata namun dimaksudkan untuk menikahnya. Lalu lamarannya diterima tetapi tidak berujung pada akad pernikahan, maka harta yang diberikannya itu berhak untuk diminta kembali."*<sup>51</sup>

Menurut pendapat Imam Syafi'ie mengenai hukum permasalahan hadiah yang diberikan pihak laki-laki atas maksud untuk menikahi pihak perempuan kemudian *khitbah*nya batal. Jika hadiah yang diberikannya itu diniatkan hanya sebatas pemberian saja bukan untuk menikahnya, maka pihak laki-laki tidak dihalalkan untuk meminta kembali hadiah yang sudah diberikan olehnya, hal ini sesuai dengan niat dan maksud dari *pengkhitbah*.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, 'Utsman, *fikih Khitbah dan Nikah*....., h. 48

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 49

Apabila pemberian itu diberikan setelah terjadinya akad nikah dan dia menyatakan dengan jelas bahwa hadiahnya itu semata hadiah saja, maka ia tidak berhak memintanya kembali, secara tidak langsung pihak laki-laki telah memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan telah memberikan hak untuk menggunakannya tanpa harus menggantinya. Maka pihak laki-laki tidak ada hak untuk meminta kembali. Dalam hal ini, sama halnya jika seseorang kedatangan tamu, lalu ia memberi tamu tersebut makanan dengan berkata: "*silahkan dimakan hidangannya*". kemudian jika tuan rumah meminta tamu tersebut untuk mengganti hidangan yang dimakan olehnya, maka tamu tidak harus menggantinya.

Pendapat ini mewajibkan ganti rugi jika pihak yang dibatalkan mengalami kerugian moral dan materiil, pembatalan *khitbah* tidak mengharuskan ganti rugi. Namun ganti rugi bergantung pada permasalahan lain yang menyertai pembatalan *khitbah* tersebut. Misalnya apabila pihak laki-laki mengharuskan kepada pihak perempuan supaya meninggalkan pekerjaannya atau mengharuskannya untuk membeli perabotan tertentu, serta apabila pihak laki-laki meminta pihak perempuan yang *dikhitbahnya* untuk melakukan sesuatu yang mana hal itu akan menghilangkan kemuliaan dan harga dirinya. Sementara setelah itu pihak laki-laki membatalkan *khitbah* dan menikahnya setelah terpenuhinya semua permintaan tersebut. Kelompok ini berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak perempuan atas permintaan pihak laki-laki yang mengharuskannya diberikan ganti rugi.

#### 4. Pendapat Imam Hambali

Berdasarkan dalam kitab-kitab fikih Imam Hambali menjelaskan bahwa jika keluarga perempuan menerima *khitbah* dari pihak laki-laki dan ia menjanjikan akan menikahinnya tetapi tidak terjadi, maka pihak laki-laki berhak untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikan olehnya kepada pihak perempuan. Dengan demikian dikarenakan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada perempuan sebagai imbalan karena akan mendapatkan akad nikah, tetapi kenyataannya akad nikah itu tidak terjadi.<sup>52</sup>

Apabila perempuan yang dil*khitbah* meninggal dunia setelah adanya kesempatan untuk menikah, maka pihak laki-laki tidak berhak untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Alasan hukum tersebut adalah karena batalnya pernikahan bukan berasal dari pihak perempuan, karena kematian tidak ada yang dapat menghindarinya. Jika yang meninggal dunia adalah pihak peng*khitbah* setelah ia memberikan hadiah dan sebelum terjadinya akad nikah, maka ahli warisnya tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan oleh pelamar kepada pihak perempuan yang dilamarnya. Dengan demikianlah hukum hadiah yang diberikan pelamar kepada pihak perempuan namun *khitbah*nya batal sehingga tidak berlangsung ke perkawinan atau karena salah seorang diantara keduanya meninggal dunia sebelum terjadinya akad nikah.

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 50



## F. TINJAUAN PUSTAKA

Adapun beberapa hasil penelitian mengenai peminangan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Kabul Ngatenan Tahun 2019, dengan judul “Denda Akibat Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat *Tando Boso* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak)”. Dari hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa pembatalan disengaja oleh pihak perempuan tidak ada sebab apapun, akan tetapi diharuskan mengembalikan dan denda sebesar nilai *tando boso*, bentuk pengembalian dan denda dapat berupa uang. Jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka akan mengakibatkan *tando boso* hangus. Sedangkan apabila pembatalan dari pihak perempuan disebabkan karena kesalahan pihak laki-laki yang selingkung maka dikenakan denda adat.<sup>53</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Pahrudin, pada tahun 2004, yang berjudul “Talaah Hukum Islam Terhadap Pembatalan Peminangan Menurut Adat di Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya, Kabupaten OKI”. Dari hasil penelitian ini, menyimpulkan proses pembatalan peminangan yang terjadi di desa tanjung pering, disebabkan adanya beberapa faktor yakni karena cacat yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak. Misal seorang mempelai laki-laki membatalkan peminangan, karena perempuan tersebut cacat fisik

---

<sup>53</sup> Kabul Ngatenan, “Denda Akibat Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat *Tando Boso* Ditinjau Menurut Hukum Islam, Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak”. (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2019), h. 64.

atau cacat non fisik. Selain itu, alasan lainnya karena ada perempuan lain yang ingin dipinang ataupun sebaliknya. Jika mempelai perempuan yang membatalkan peminangan dikarenakan mempelai laki-laki cacat fisik.<sup>54</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Narwiro, pada tahun 2011, yang berjudul “Batalnya Rencana Perkawinan Karena Tidak Terpenuhi Pintaan di Desa Aur Kecamatan Lubay, Kabupaten Muara Enim ditinjau oleh Mazhab Syari’i”. Dari hasil penelitian ini adalah pembatalan peminangan kadar pintaan yang berlaku di desa Aur Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim, pintaan yang mayoritas terjadi yaitu berupa 10 juta, emas 3 suku dan dodol 250 kg. Pintaan ini kemudian diantarkan oleh mempelai laki-laki dalam waktu dua minggu atau sepuluh hari sebelum pernikahan. Akibat dari batalnya rencana pernikahan karena besarnya pintaan yang mengakibatkan mempelai kawin lari bahkan ada yang hamil diluar nikah karena tidak dapat memenuhi pintaan calon mempelai perempuan.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Pahrudin, “Talaah Hukum Islam Terhadap Pembatalan Peminangan Menurut Adat Di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya, Kabupaten OKI”. (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Fatah, Palembang, 2004), h. 49

<sup>55</sup> Siti Narwiro, “Batalnya Rencana Perkawinan Karena Tidak Terpenuhi Pintaan Di Desa Aur Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim ditinjau oleh Mazhab Syari’i”, (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah, Palembang, 2011), h. 56.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahbah Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, edisi 1, cetakan 3*, Jakarta: Azmah, 2014.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Faiz el Muttaqim, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Aka Press, 1992.
- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Maqayis al-Lughah*, Juz 2, Kairo: Ittihad al-Kitab al-Arab, 2002.
- Abu Sahla dan Nurul Nazara, *Buku Pintar Pernikahan*, Jakarta: Belanoor, 2011.
- Ahmad Ali, *Buku Besar Al-Bukhari & Muslim*, (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013.
- Ahmad Anwar, *Prinsip Metodologi Research*, Jakarta: Sumbangsih, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Alkaf Idrus, *Persiapan Perkawinan Yang Harmonis Dan Bahagia*, Pekalongan: Gunung Mas, 1996.
- Amir Nuruddin, Azhari Akma Tarigan, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, cetakan Ke-1*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*.

- Amir Syarifuddin dalam buku Aulia Muthiah *"hukum Islam Dinamika seputar hukum keluarga*, Yogyakarta: Pustak Baru Press, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan terjemahannya dilengkapi dengan Asbabul Nuzul dan Hadits Shahi*, Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama, 1991/1992.
- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Cv. Toha Putra Semarang, 1993.
- Hadits Shahih, Diriwayatkan oleh Ahmad (III/334,360), Abu Daud (no. 2082) dan al-Hakim (III/165), dari Sahabat Jabir bin 'Abdillah Radhiyallahu 'anhuma.
- Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh. Terj. Saefullah Ma'sum*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Muhammad Ismail Al-Amir Ash-Shanani, *Subullus Sallam Syarah Bulughul Maram, jilid 2*, Bandung: Darus Sunnah.
- Muhammad Usman, *Buku Deras Mata Kuliah Filsafat Hukum Islam*, Sukoharjo: Jurusan Syari'ah STAIN Surakarta, 2009
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nasruddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Berbasis Nash*, Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2017.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pusat Setia, 2010.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2*, Cet.1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 2.*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jus 6*, Bandung: PT Alma'arif, 1980.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Surabaya: Rhedbook Publisher, 2008.
- Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah-Sayyid Sabiq*, Alih Bahasa Oleh Abdul Majid, Umar Mutjahidin dan Arif Mahmudi, Jakarta Timur: Ummul Qura, Belajar Islam dari sumbernya, 2014.
- Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian atau Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Tim Pustaka Buana, *Kitab Lengkap KUHPer, KUH Acara Perdata, KUH Acara Pidana*, Jakarta: Pustaka Buana, 2016.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 7*, Bairut: Darul Al-Fikr, 1989.
- Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, Juz IX, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*, (Depok: Gema Insani, 2007.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-ila' Istri, Li'an, Masa Iddah)*, jilid IX, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan nasional*, Medan: Zahir Trading co, 1975

### **Karya Ilmiah**

Kabul Ngatenan, “Denda Akibat Pembatalan Pertunangan Pada Saat Tando Boso Ditinjau Menurut Hukum Islam, Studi Kasus Masyarakat Melayu Kampung Merempan Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, 2019.

Pahrudin, “Talaah Hukum Islam Terhadap Pembatalan Peminangan Menurut Adat Di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya, Kabupaten OKI”. (Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Fatah, Palembang, 2004).

Siti Narwiro, “Batalnya Rencana Perkawinan Karena Tidak Terpenuhi Pintaan Di Desa Aur Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim ditinjau oleh Mazhab Syari’i”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah, Palembang, 2011.

### **Jurnal**

Saifuddin Sa’dan dan Arif Afandi, *Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Volume 1 No. 1. Januari-Juni 2017, ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167.

### **Data Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Yeni Noviarita, pihak yang membatalkan, pada tanggal 11 Maret 2020, pukul 09.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Nur Diana, pihak yang membatalkan, pada tanggal 11 Maret 2020, pukul 11.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan, Windi Lestari, pihak yang membatalkan, pada tanggal 11 Maret 2020, pukul 14.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhroni, Tokoh Agama Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, pada tanggal 13 Maret 2020, pukul 13.15 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Supiyo Tokoh Adat Desa Sumber Deras Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, pada tanggal 14 Maret 2020, pukul 14.15 WIB.